

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemendepartemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2019: 4). Dalam Sahroni (2021:38), akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Peran akuntan sektor publik bertujuan untuk: Memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat dilakukan oleh sektor swasta. Namun, untuk beberapa peran dan tugas, kehadiran sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta.

Akuntansi sektor publik memainkan peran vital dan menjadi topik diskusi baik bagi praktisi sektor publik maupun akademisi (Mardiasmo, 2021:1). Penekanan pembahasan akuntansi sektor publik, yang seharusnya mendapat porsi lebih besar dari praktisi dan akademisi, adalah penekanan pada upaya memajukan sektor publik, yang dipandang kurang efisien dan kurang menarik, agar tidak tertinggal dari swasta. sektor yang dinilai lebih maju dan efisien. Namun, saat ini di kalangan praktisi, khususnya pemerintah, lebih banyak perhatian diberikan untuk menilai kelayakan praktik manajemen pemerintah, yang mencakup kebutuhan untuk meningkatkan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan dan pengembangan keuangan, sistem pemantauan dan audit, serta berbagai implikasi. keuangan pada kebijakan pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Sholehah, 2019: 217). Dalam bidang ekonomi,

perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pelaporan keuangan pusat dan daerah, seharusnya Terkelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan pembangunan dan memperluas wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Kuntandi Cris, 2022). Dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi memiliki suatu peraturan yakni Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ompusunggu & Salomo, 2019). Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya (Siahaan, 2020)

Pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (Jitmau et al., 2017). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Jitmau et al., 2017). Dengan adanya transparansi dalam aktivitas urusan publik salah satunya di bidang administrasi keuangan dapat memudahkan pengawasan terhadap pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemerintahan.

(Agus Dwiyanto, 2021) menyatakan bahwa transparansi merupakan sebuah wadah penyediaan informasi mengenai pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan dari dua pengertian transparansi diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam pemberian informasi, baik itu terkait informasi kebijakan maupun informasi keuangan untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Kinerja intansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis karena saat ini perbaikan kinerja intansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Pangaribuan, 2020).

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 13.567 permasalahan senilai Rp8,97 triliun dalam pemeriksaan selama semester I tahun 2020. Jumlah tersebut meliputi 6.713 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan senilai Rp8,28 triliun, serta 152 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp692,05 miliar. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.051 senilai Rp8,28 triliun merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp1,79 triliun, potensi kerugian senilai Rp3,30 triliun, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3,19 triliun. Atas permasalahan tersebut entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan selama proses pemeriksaan sebesar Rp670,50 miliar (8%) diantaranya Rp384,71 miliar merupakan penyetoran dari pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya. Selain itu, 2.651 permasalahan ketidakpatuhan mengakibatkan penyimpangan administrasi (BPK RI, 2020). Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, maka keberadaan lembaga pengawasan semakin diperlukan, namun apakah dengan jumlah lembaga-lembaga pengawasan yang cukup banyak dan pelaksanaan pengawasan yang belapis-lapis dapat memperoleh hasil yang efektif, oleh karena inilah semakin banyaknya waktu yang harus disediakan hanya untuk melayani aparat pengawasan. Hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan dan dicari solusi untuk kepentingan yang lebih luas, apakah dengan melakukan penyederhanaan terhadap lembaga-lembaga pengawasan yang ada ataukah membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya-upaya peningkatan kinerja pemerintah. LAKIP merupakan pertanggungjawaban di dalam instansi pemerintahan. Laporan ini dibuat setiap tahun untuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi didalam pencapaian sasaran yang telah disusun dan ditetapkan.

Tabel 1.1 LAKIP Kecamatan Bekasi Utara 2019-2020

Komponen yang Dinilai	Nilai		Keterangan
	2019	2020	
a. Perencanaan kinerja	96,27	91,13	-5,14
b. Pengukuran kinerja	85,28	86,64	1,36
c. Pelaporan kinerja	96,79	99,29	2,42
d. Evaluasi kinerja	96,79	89,88	-6,09
e. Capaian Kinerja	83,12	80,25	-2,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	-

Sumber: Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara, 2019-2022

Berdasarkan tabel 1.1 dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara secara umum mengalami peningkatan. Namun, beberapa komponen penilaian pada aspek perencanaan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja menurun. Selain itu juga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III, IV, dan individu pegawai.

1. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar mampu

meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara 6 berkala oleh pimpinan, sehingga mampu menyujudkan efektivitas program kinerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi.

3. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja OPD yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.
4. Memerintahkan inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar OPD, serta kepada Bappeda dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
6. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai merupakan perwujudan dari implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun dan diakhiri jabatan kepala pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit,review,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda. Studi Putra (2021) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Salamah, *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah. Dan penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah diantaranya (P. A. Putra, 2021), (Jatmiko, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Adapun penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu perbedaan objek penelitian dan sebelumnya menggunakan 2 variabel independen yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal sedangkan penelitian ini ditambahkan 1 variabel lagi yaitu Transparansi (Jatmiko, 2020). Dengan transparansi yang dilakukan secara baik dan memang benar transparan maka akan memberikan pengetahuan langsung kepada publik dan pengawasan yang lebih baik dan kinerja pemerintah daerah secara khusus dan umum dapat meningkatkan sesuai kegiatan yang telah dilakukan dan diawasi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan **judul “Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, transparansi dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Empiris Kecamatan Bekasi Utara)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kecamatan Bekasi Utara ?
2. Apakah terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kecamatan Bekasi Utara ?
3. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kecamatan Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kecamatan Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kecamatan Bekasi Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah di Kecamatan Bekasi Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Kecamatan

Bekasi Utara).

2. Bagi instansi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pihak instansi pemerintahan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi instansi dan memperbaiki kendala yang ada dalam menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optimal.

3. Bagi Pembaca dan Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, transparansi dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memahami lebih jelas isi dari skripsi ini, maka materi-materi yang tertera pada skripsi ini ditulis menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dalam sub bab yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan lainnya, dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dalam penelitian ini dengan berisikan Latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variable, waktu dan tempat penelitian, metode

pengambilan sampel, metode analisis data

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dari hasil penelitian, statistik deskriptif, pengujian hipotesis Serta pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti dan implikasi manajerial

